

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
DINAS KETAHANAN PANGAN

Jl. Zainab Bahmada Rustam Pasar Manna
Kabupaten Bengkulu Selatan

KATA PENGANTAR

Dalam rangka melaksanakan reformasi birokrasi di Dinas Ketahanan Pangan, maka dipandang perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2025 dengan maksud dapat memperoleh gambaran atau sebagai alat ukur mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi.

Laporan ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Diharapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2025 ini dapat digunakan sebagai acuan dalam menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen perencanaan.

Manna, 2025
Kepala Dinas Ketahanan Pangan
Kabupaten Bengkulu Selatan



Ir. SUSMANTO, MM
NIP. 19680814 200212 1 004

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan merupakan hak asasi bagi setiap rakyat Indonesia. Pemenuhan pangan sangat penting sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas dalam mendukung pembangunan nasional. Oleh karena itu, upaya untuk memenuhi kecukupan pangan merupakan kerangka dasar dalam pembangunan nasional dan diharapkan mampu mendorong upaya pembangunan sektor lainnya.

Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan mengamankan bahwa negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional maupun daerah hingga perseorangan secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sepanjang waktu dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal.

Kebijakan umum pemerintah mengacu kepada pembangunan yang *good governance*, dimana dalam menjalankan pemerintahan berorientasi kepada hasil (*result oriented government*). Pelaksanaan pemerintahan berupaya untuk menghasilkan *output* dan *outcome* yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. *Output* adalah hasil langsung dari program-program atau kegiatan-kegiatan yang dijalankan pemerintah dan dapat berwujud sarana, barang dan jasa pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan *outcome* adalah berfungsinya sarana, barang dan jasa tersebut sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat. *Output* dan *outcome* inilah yang selayaknya dipandang sebagai kinerja, bukan kemampuan menyerap anggaran seperti persepsi yang ada selama ini. Namun demikian uang tetap merupakan faktor penting untuk mencapai kinerja tertentu, karena itu prinsip dasar manajemen berbasis kinerja adalah *noperformance, nomoney*.

Sehubungan dengan itu maka sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang telah dibangun dalam rangka upaya mewujudkan *good governance* dan sekaligus *result oriented government*, perlu terus dikembangkan dan informasi kinerjanya diintegrasikan kedalam sistem penganggaran dan pelaporan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara serta berbagai peraturan perundangan dibawahnya. Dengan demikian, kedepan anggaran negara baik pusat maupun daerah menjadi anggaran berbasis kinerja, yaitu anggaran yang dihitung dan disusun berdasarkan perencanaan kinerja atau dengan kata lain dihitung dan disusun berdasarkan kebutuhan untuk menghasilkan *output* dan *outcome* yang diinginkan masyarakat.

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam kerangka penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia adalah telah dikeluarkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007, tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Setiap Instansi Pemerintah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicators) secara formal untuk tujuan dan sasaran strategis untuk masing-masing tingkatan (level) secara berjenjang. Indikator Kinerja Utama (IKU) pada unit organisasi setingkat EselonII/SatuanKerja/Unit kerja mandiri sekurang-kurangnya adalah indikator keluaran (*output*). Dengan ditetapkannya indikator kinerja utama secara formal dalam suatu lembaga pemerintah, diharapkan akan diperoleh informasi kinerja yang penting diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik serta diperolehnya ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan adalah untuk memperoleh gambaran atau sebagai alat ukur mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan dinas sebagai penjabaran dari visi, misi dan sasaran strategis Dinas Ketahanan Pangan yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan, sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Sedangkan tujuan dari penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) ini adalah:

- 1). Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik;
- 2). Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

1.3 Landasan Hukum

Dalam penyusunan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) landasan hukum yang digunakan:

1. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 25, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi Dan Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 03 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021–2026 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 03 Tahun 2023 (Lembaran daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2023 Nomor 03);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan;
11. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 18 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan.

BAB II**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA**

Dalam Penyusunan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan, Indikator Kinerja Utama (IKU) digunakan untuk mengukur dan meningkatkan kinerja sejauh mana keberhasilan pelaksanaan dokumen perencanaan tersebut. Kriteria dokumen perencanaan yang baik adalah jika dokumen tersebut dapat dievaluasi sejauh mana keberhasilannya. Evaluasi keberhasilan tersebut hanya dapat dilakukan jika dalam dokumen perencanaan telah dilengkapi dengan seperangkat indikator kinerja yang akan mengukur capaian pelaksanaan perencanaan.

Dalam perencanaan kinerja tahunan, maka Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun Anggaran 2025 ini akan menjadi pemandu dalam menentukan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025. Dengan demikian setiap tahunnya, suatu instansi pemerintah harus merencanakan program dan kegiatan sesuai dengan ukuran keberhasilan yang telah ditetapkan. Selanjutnya program dan kegiatan yang telah direncanakan tersebut yang harus diajukan usulan anggarannya dalam dokumen RKA SKPD. Dengan pendekatan ini maka diperoleh beberapa manfaat, yaitu:

- Program dan kegiatan yang dilaksanakan suatu instansi pemerintah akan terkait langsung dengan ukuran keberhasilan instansi tersebut yang merupakan penjabaran dari tugas dan fungsi instansi,
- Terdapat keselarasan antara indikator kinerja kegiatan dengan IKU instansi yang bersangkutan,
- Anggaran hanya dipergunakan untuk program dan kegiatan yang memang akan mendukung keberhasilan instansi dalam upaya pelaksanaan tugas dan fungsi.

Setelah pelaksanaan program dan kegiatan, maka dilakukan pengukuran berdasarkan IKU yang telah ditetapkan tersebut. Hasil pengukuran ini selanjutnya dituangkan dalam laporan kinerja instansi yang bersangkutan serta sebagai dasar pelaksanaan evaluasi kinerja untuk mewujudkan perbaikan kinerja secara berkesinambungan.

Berdasarkan Sasaran Strategis Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2021-2026, ditetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan sebagai berikut:

1. Penanganan daerah rawan pangan;

Adalah penanganan dari suatu kondisi ketidakmampuan untuk memperoleh pangan yang cukup dan sesuai untuk hidup sehat dan beraktivitas dengan baik untuk sementara waktu dalam jangka panjang. Kondisi ini dapat saja sedang terjadi atau berpotensi untuk terjadi. Rawan pangan juga didefinisikan kondisi didalamnya tidak hanya mengandung unsur yang berhubungan dengan *state of poverty* saja seperti masalah kelangkaan sumber daya alam, kekurangan modal, miskin motivasi, dan sifat malas yang disebabkan ketidakmampuan mereka mencukupi konsumsi pangan. Namun juga mengandung unsur yang bersifat dinamis yang berkaitan dengan proses bagaimana pangan yang diperlukan didistribusikan dan dapat diperoleh setiap individu/rumah tangga melalui proses pertukaran guna mempengaruhi kebutuhan pangannya.

2. Analisis Neraca Bahan Makanan (NBM);

Adalah suatu analisis yang memuat informasi tentang situasi pengadaan pangan (Food Supply) dan penggunaan pangan (Food Utilization) sehingga dapat diketahui ketersediaan pangan untuk dikonsumsi penduduk pada suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu. Dari analisis Neraca Bahan Makanan inilah dapat diketahui skor PPH Ketersediaan suatu wilayah.

3. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi;

Adalah laporan tentang susunan keragaman pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama pada tingkat konsumsi pangan. PPH merupakan instrumen untuk menilai situasi konsumsi pangan wilayah yang dapat digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan konsumsi pangan kedepan, dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, budaya dan preferensi konsumsi pangan masyarakat. Selain itu, PPH juga dapat dijadikan acuan untuk menentukan sasaran dalam perencanaan dan evaluasi penyediaan khususnya produksi pangan.

4. Pemberdayaan masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan (P2KP);

Adalah pembuatan suatu media penyuluhan pertanian kepada kelompok P2KP dengan cara membuat lahan percontohan, agar kelompok tersebut bisa melihat dan membuktikan terhadap objek yang didemonstrasikan. Dalam hal ini tujuan utamanya adalah optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan untuk pengembangan pangan.

5. Pemantauan harga pangan pokok;

Adalah pengumpulan data secara berkala terhadap fluktuasi harga pangan pokok disuatu wilayah tertentu yang digunakan sebagai bahan masukan bagi perumusan kebijakan di bidang pangan, utamanya yang terkait dengan kebijakan peningkatan produksi, harga dan permintaan pangan.

6. Cadangan pangan daerah;

Adalah persediaan pangan yang dikelola atau dikuasai pemerintah daerah, yang dapat dipergunakan dalam situasi keadaan darurat; bencana alam; bencana sosial; paceklik; dan atau rawan pangan.

7. Pengembangan distribusi pangan masyarakat;

Adalah upaya pemberdayaan LDPM dalam pengelolaan distribusi pangan (gabah/beras/jagung) melalui pembelian, penyimpanan, pengolahan, dan pemasaran untuk mendorong stabilitasi harga pangan ditingkat petani dan mengembangkan cadangan pangan masyarakat.

8. Pengawasan mutu dan keamanan pangan segar;

Adalah suatu tindakan pengawasan terhadap nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan pangan, kandungan gizi, dan standar pangan yang belum mengalami pengolahan yang dapat dikonsumsi langsung dan atau yang dapat menjadi bahan baku pengolahan pangan. Hal ini untuk menjamin agar pangan segar tersebut layak dikonsumsi dan terhindar dari kontaminasi cemaran fisik, kimia maupun mikrobiologi.

BAB III

GAMBARAN UMUM

3.1 Visi dan Misi

Pemilihan umum kepala daerah Kabupaten Bengkulu Selatan yang telah mengantarkan Bupati dan Wakil Bupati terpilih memimpin Kabupaten Bengkulu Selatan periode Tahun 2021-2026, dengan visi ***“Terwujudnya Masyarakat Madani menuju Bengkulu Selatan EMAS”***. Dimensi yang terkandung dalam kalimat “EMAS” yaitu mewujudkan Bengkulu Selatan yang Elok, Maju, Aman dan Sejahtera.

Untuk mewujudkan Visi tersebut, maka Misi yang ditetapkan Misi lima tahun kedepan yang menjadi pedoman dalam Pembangunan Kabupaten Bengkulu Selatan yaitu:

- Misi I : Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, sejahtera dan berdaya saing;
- Misi II : Memperkuat infrastruktur berkeadilan, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- Misi III : Membangun kemandirian ekonomi yang berkualitas dan berdaya saing;
- Misi IV : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta pelayanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi.

Program prioritas kepala dan wakil kepala daerah terpilih diantaranya adalah :

1. Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik;
2. Peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan;
3. Penyediaan infrastruktur dan sarana publik yang berkualitas dan prioritas;
4. Revitalisasi pembangunan pertanian untuk mewujudkan kedaulatan pangan;
5. Pembangunan kualitas lingkungan hidup dan mitigasi bencana;

6. Pengembangan UMKM, industri, ekonomi kreatif dan pariwisata;
7. Pemberdayaan pemuda, perempuan dan keluarga sejahtera;
8. Penertiban umum dan keamanan;
9. Pembangunan kehidupan sosial yang agamis dan berbudaya.

Dalam mewujudkan visi, misi dan program kerja kepala daerah terpilih Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan menyusun program kerja dan rencana kerja yang mengacu pada program prioritas kepala daerah. Dinas Ketahanan Pangan memiliki 4 Program dengan 1 Program Penunjang dan 3 Program Prioritas yang menjadi indikator utama keberhasilan program yaitu:

- 1) Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat dengan sasaran Terwujudnya stabilitas harga pangan dan Meningkatkan kualitas konsumsi pangan yang beragam;
- 2) Program Penanganan Kerawanan Pangan dengan sasaran Tertanganinya kerawanan pangan daerah;
- 3) Program Pengawasan Keamanan Pangan dengan sasaran Terawasinya keamanan pangan.

3.2 Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 18 Tahun 2023, Dinas Ketahanan Pangan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi pemerintahan di bidang Ketahanan Pangan yang menjadi kewenangan daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah. Dalam melaksanakan tugas, Dinas Ketahanan Pangan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian penyusunan rencana strategis (RENSTRA) Dinas sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);

- b. Perumusan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) serta pengawasan pelayanan bidang Ketahanan Pangan serta pengelolaan sistem informasi;
- c. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang Ketahanan Pangan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan ketahanan pangan, kefarmasian, alat ketahanan pangan dan PKRT serta sumber daya ketahanan pangan;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kebijakan, program dan kegiatan bidang ketahanan pangan;
- f. Pembinaan pengawasan dan pengendalian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP);
- g. Pembinaan kelompok jabatan fungsional dan unit pelaksana teknis dibawah koordinasi dinas;
- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan;

Sedangkan Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu

Selatan terdiri dari :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretaris terdiri dari:
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - Kelompok Jabatan Fungsional yaitu Kelompok Substansi Perencanaan dan Keuangan;
3. Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan terdiri dari:
 - Kelompok Substansi Ketersediaan Pangan;
 - Kelompok Substansi Sumber Daya Pangan;
 - Kelompok Substansi Kerawanan Pangan.
4. Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan terdiri dari:
 - Kelompok Substansi Konsumsi Pangan;
 - Kelompok Substansi Panganekaragaman Konsumsi Pangan;
 - Kelompok Substansi Keamanan Pangan.

5. Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan terdiri dari:
 - Kelompok Substansi Distribusi Pangan;
 - Kelompok Substansi Harga Pangan;
 - Kelompok Substansi Cadangan Pangan.
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB IV

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Berdasarkan atas Tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan merupakan kewenangan serta tanggungjawab pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan, maka ditetapkan beberapa indikator utama sesuai dengan visi, misi, uraian tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan yang berupa kuantitas yang lebih jelas dan nyata dari setiap program kerja dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan. Adapun uraian Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan terlampir.

BAB V

PENUTUP

Dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2025 diharapkan dapat dijadikan acuan dalam mengukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan dinas, sehingga dapat dijadikan dasar dalam pembuatan kontrak kinerja yang baik diwujudkan oleh para pejabat sebagai pelaksanaan tugas dan tanggung jawab. Dengan Indikator Kinerja Utama ini diharapkan para pimpinan instansi tidak hanya mengelola anggaran saja, akan tetapi pimpinan juga harus mampu menunjukkan serta mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat.

Semoga Indikator Kinerja Utama ini dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja aparatur pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan.

LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
DINAS KETAHANAN PANGAN
JI. ZAINAB BAHMADA RUSTAM MANNA.

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
NOMOR 07 TAHUN 2025
TENTANG

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS KETAHANAN PANGAN TAHUN 2025

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN BENGKULU SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Ketahanan Pangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 04 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 09 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 03 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021-2026 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 03 Tahun 2023 (Lembaran daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2023 Nomor 03);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan;
16. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 18 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan.

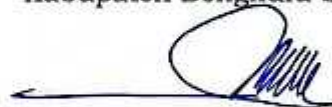
MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2022-2026.
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manna
Pada tanggal 67 Januari 2025

Kepala Dinas Ketahanan Pangan
Kabupaten Bengkulu Selatan



Ir. SUSMANTO, MM
NIP. 19680814 200212 1 004

LAMPIRAN

: Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2025

Nomor

: 07 Tahun 2025

Tanggal

: 7 Januari 2025

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
ESELON II (KEPALA PERANGKAT DAERAH)
TAHUN 2025**

NO	Tujuan Perangkat Daerah	Indikator Tujuan	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Sasaran	Penjelasan/ Formulasi Penghitungan	Target	Satuan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan masyarakat	Indeks Ketahanan Pangan	Meningkatnya ketersediaan dan pola konsumsi pangan masyarakat	1. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	$\% \text{ AKE} \times \text{ bobot,}$ dimana $\% \text{ AKE} = \frac{\text{Energi Ketersediaan Pangan}}{\text{AKE Ketersediaan}} \times 100\%$ bobot = bobot masing-masing golongan pangan	92,79	-	Dokumen Neraca Bahan Makanan (NBM)	Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan
				2. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	$\% \text{ AKE} \times \text{ bobot,}$ dimana $\% \text{ AKE} = \frac{\text{Energi Konsumsi Pangan}}{\text{AKE Konsumsi}} \times 100\%$ bobot = bobot masing-masing golongan pangan	91,60	-	Dokumen PPH Konsumsi	Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan

Catatan:

- Sumber pengisian Tujuan dan Indikator Tujuan, serta Sasaran dan Indikator Sasaran adalah Cascading OPD yang sudah disusun
- Penjelasan/Formulasi Penghitungan diisi dengan cara atau langkah penghitungan untuk mencapai target yang akan ditetapkan
CONTOH= Untuk target yang merupakan hasil rilis dari kinerja BPS, pada kolom penjelasan/formulasi penghitungan diisi "Nilai Penghitungan oleh BPS"
- Target Kinerja ditetapkan oleh pejabat yang bersangkutan dengan memperhatikan potensi yang dimiliki (anggaran, SDM, standar teknis, dan lain-lain)

INDIKATOR KINERJA UTAMA
ESELON III (SEKRETARIS DAN KEPALA BIDANG)
TAHUN 2025

NO	Program dan Kegiatan	Sasaran Program dan Kegiatan	Indikator Program dan Kegiatan	Penjelasan/ Formulasi Penghitungan	Target	Satuan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota	1. Meningkatnya nilai AKIP	1. Nilai AKIP OPD	Penilaian dari Inspektorat	80	-	DKP	Sekretaris
		2. Meningkatnya kualitas pengelolaan administrasi keuangan	2. Persentase tindak lanjut LHP BPK	$\frac{\Sigma \text{ temuan yang ditindak lanjut}}{\Sigma \text{ temuan/LHP}} \times 100\%$	100	-		
		3. Meningkatnya tata kelola pelayanan administrasi umum dan kepegawaian	3. Indeks kepuasan ASN	Hasil survey kepuasan pegawai	82,5	-		
1.1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya komponen pemenuhan dokumen SAKIP	Persentase pemenuhan dokumen SAKIP PD	$\frac{\Sigma \text{ dokumen SAKIP yang tersusun}}{\Sigma \text{ dokumen SAKIP yang harus dipenuhi}} \times 100\%$	100	%	DKP	Sekretaris
1.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya pengelolaan administrasi keuangan PD	Persentase tindak lanjut LHP BPK	$\frac{\Sigma \text{ temuan yang ditindak lanjut}}{\Sigma \text{ temuan/LHP}} \times 100\%$	100	%	DKP	Sekretaris
1.3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya tata kelola pelayanan administrasi kepegawaian PD	Indeks kepuasan pelayanan kepegawaian ASN	Hasil survey kepuasan pegawai	82,5	-	DKP	Sekretaris
1.4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya tata kelola pelayanan administrasi umum PD	Indeks kepuasan pelayanan umum ASN	Hasil survey kepuasan pegawai	82,5	-	DKP	Sekretaris
1.5	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya penyediaan barang milik daerah PD	Persentase barang milik daerah PD yang disediakan	$\frac{\Sigma \text{ barang milik daerah yang tersedia}}{\Sigma \text{ barang milik daerah yang harus disediakan}} \times 100\%$	100	%	DKP	Sekretaris
1.6	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya jasa penunjang urusan PD	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	$\frac{\Sigma \text{ penyediaan jasa penunjang urusan PD}}{\Sigma \text{ penyediaan jasa penunjang yg harus disediakan}} \times 100\%$	100	%	DKP	Sekretaris

1.7	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan PD	Persentase barang milik daerah pada OPD yang dipelihara	$\frac{\Sigma \text{ barang milik daerah yang dipelihara}}{\Sigma \text{ barang milik daerah OPD yang harus dipelihara}} \times 100\%$	40	%	DKP	Sekretaris
2	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Terkelolanya sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian	Persentase pendukung ketersediaan cadangan pangan	$\frac{\Sigma \text{ infrastruktur yang ada di kecamatan}}{\Sigma \text{ kecamatan}} \times 100\%$	50	%	DKP	Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan
2.1	Kegiatan Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan	Persentase infrastruktur dan pendukung cadangan pangan yang disediakan	$\frac{\Sigma \text{ infrastruktur cadangan pangan yg tersedia}}{\Sigma \text{ infrastruktur cadangan pangan yg harus disediakan}} \times 100\%$	100	%	DKP	Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan
3	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	1. Terwujudnya stabilitas harga pangan	1. Persentase stabilitas harga pangan di tk. produsen/konsumen	$\frac{\text{GKP pada saat panen raya}}{\text{HPP GKP}} \times 100\%$	100	%	DKP	Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan
		2. Meningkatnya kualitas konsumsi pangan yang beragam	2. Persentase Angka Kecukupan Energi (AKE)	$\frac{\text{Energi konsumsi beras (kkal/hari)}}{\text{Total energi konsumsi seluruh kelompok pangan}} \times 100\%$	45	%	BPS Bengkulu Selatan	Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan
3.1	Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Pangan Lainnya	Tersedianya dan tersalurkannya pangan pokok atau pangan lainnya sesuai kebutuhan daerah	Persentase pemantauan pasokan dan harga pangan	$\frac{\Sigma \text{ pemantauan harga pangan yang dilakukan}}{\Sigma \text{ pemantauan harga pangan tiap tahun}} \times 100\%$	80	%	DKP	Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan
3.2	Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kab/Kota	Terkelolanya keseimbangan cadangan pangan daerah	Persentase cadangan pangan daerah	$\frac{\Sigma \text{ cadangan pangan yang tersedia}}{\Sigma \text{ cadangan pangan kabupaten}} \times 100\%$	100	%	DKP	Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan
3.3	Kegiatan Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi	Tersedianya harga minimum daerah untuk pangan lokal	Harga minimum daerah untuk pangan lokal	Harga minimum daerah (umbi-umbian) per kg	4.000	Rupiah	DKP	Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan

3.4	Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Tercapainya target konsumsi pangan perkapita/hari sesuai AKG	Jumlah konsumsi pangan perkapita/hari	Data dari BPS	271,9	gr/kap/hr	BPS Bengkulu Selatan	Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan
4	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Tertanganinya kerawanan pangan daerah	Persentase daerah rawan pangan yang tertangani	$\frac{\Sigma \text{ daerah rawan pangan yang ditangani}}{\Sigma \text{ daerah rawan pangan prioritas 1-3}} \times 100\%$	15,79	%	DKP	Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan
4.1	Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Tersusunnya Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Persentase Peta FSVA yang tersusun	$\frac{\Sigma \text{ peta FSVA yang disusun}}{\Sigma \text{ peta FSVA yg harus tersedia}} \times 100\%$	100	%	DKP	Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan
4.2	Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya penanganan kerawanan pangan daerah	Persentase penanganan kerawanan pangan daerah	$\frac{\Sigma \text{ daerah rawan pangan yang ditangani}}{\Sigma \text{ daerah rawan pangan yg harus ditangani}} \times 100\%$	100%	%	DKP	Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan
5	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Terawasinya keamanan pangan	Persentase pangan yang aman dikonsumsi	$\frac{\Sigma \text{ bahan pangan yang aman dikonsumsi}}{\Sigma \text{ bahan pangan yang diuji}} \times 100\%$	89,65	%	DKP	Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan
5.1	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kab/Kota	Meningkatnya pengawasan keamanan pangan segar daerah	Persentase pengawasan keamanan pangan segar daerah	$\frac{\Sigma \text{ pengawasan keamanan pangan segar yg terlaksana}}{\Sigma \text{ pengawasan pangan segar yg harus dilaksanakan}} \times 100\%$	100	%	DKP	Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan

Catatan:

- Sumber pengisian Program, Sasaran Program dan Indikator Program, serta Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Indikator Kegiatan adalah Cascading OPD yang sudah disusun
- Penjelasan/Formulasi Penghitungan diisi dengan cara atau langkah penghitungan untuk mencapai target yang akan ditetapkan
CONTOH= Untuk target yang merupakan hasil rilis dari kinerja BPS, pada kolom penjelasan/formulasi penghitungan diisi "Nilai Penghitungan oleh BPS"
- Target Kinerja ditetapkan oleh pejabat yang bersangkutan dengan memperhatikan potensi yang dimiliki (anggaran, SDM, standar teknis, dan lain-lain)

INDIKATOR KINERJA UTAMA
ESELON IV/PEJABAT FUNGSIONAL
TAHUN 2025

NO	Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Penjelasan/ Formulasi Penghitungan	Target	Satuan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	Dokumen	DKP	Sekretariat
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	Laporan	DKP	Sekretariat
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Laporan	DKP	Sekretariat
4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya gaji dan tunjangan ASN OPD	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	30	Orang/bln	DKP	Sekretariat
5	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	1	Dokumen	DKP	Sekretariat
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1	Laporan	DKP	Sekretariat
7	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	30	Paket	DKP	Sekretariat
8	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Meningkatnya SDM ASN yang handal berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	5	Orang	DKP	Sekretariat

9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	1	Paket	DKP	Sekretariat
10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1	Paket	DKP	Sekretariat
11	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1	Paket	DKP	Sekretariat
12	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1	Paket	DKP	Sekretariat
13	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1	Dokumen	DKP	Sekretariat
14	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1	Laporan	DKP	Sekretariat
15	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	2	Unit	DKP	Sekretariat
16	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya peralatan dan mesin penunjang kegiatan OPD	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	3	Unit	DKP	Sekretariat
17	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik di OPD	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	1	Laporan	DKP	Sekretariat
18	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	1	Laporan	DKP	Sekretariat
19	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	30	Unit	DKP	Sekretariat
20	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya di OPD	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	12	Unit	DKP	Sekretariat

21	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya	Terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	1	Unit	DKP	Sekretariat
22	Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Tersedianya Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang tersedia	Jumlah Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang tersedia	1	Unit	DKP	Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan
23	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Tersedianya Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan berbasis sumber daya lokal yang tersedia	Pangan berbasis sumber daya lokal yang tersedia	1	Laporan	DKP	Bidang Konsumsi dan Keamanan
24	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	Terlaksananya Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	1	Laporan	DKP	Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan
25	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota	Berkembangnya Kelembagaan Distribusi Pangan kabupaten/kota	Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan	Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan	4	Unit	DKP	Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan
26	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Tersedianya Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	1	Dokumen	DKP	Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan
27	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Tersusunnya rencana kebutuhan pangan lokal	Rencana kebutuhan pangan lokal	Rencana kebutuhan pangan lokal	1	Dokumen	DKP	Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan
28	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Tersedianya cadangan pangan pemerintah	Jumlah cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota	Jumlah cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota	29,85	Ton	DKP	Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan
29	Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	Terselenggaranya koordinasi dan sinkronisasi penentuan harga minimum pangan pokok lokal	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penentuan harga minimum pangan pokok lokal	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penentuan harga minimum pangan pokok lokal	1	Laporan	DKP	Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan
30	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan perkapita/tahun	Tersusunnya target konsumsi pangan perkapita/tahun	Target konsumsi pangan per kapita per tahun	Target konsumsi pangan per kapita per tahun	1	Dokumen	DKP	Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan

31	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Terlaksananya pemberdayaan masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan	Jumlah pemberdayaan kelompok masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal	Jumlah pemberdayaan kelompok masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal	1	Laporan	DKP	Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan
32	Penyusunan, Pemuktahiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Tersusunnya dokumen analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang dimutakhirkan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang dimutakhirkan	1	Dokumen	DKP	Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan
33	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pada daerah rawan pangan	Jumlah pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	1	Dokumen	DKP	Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan
34	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya sapras pengujian mutu keamanan pangan segar	Jumlah sarana dan prasarana pengujian mutu dan keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana pengujian mutu dan keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah Kabupaten/Kota	1	Dokumen	DKP	Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan

Catatan:

- Sumber pengisian Sub Kegiatan, Sasaran Sub Kegiatan dan Indikator Sub Kegiatan adalah Cascading OPD yang sudah disusun
- Penjelasan/Formulasi Penghitungan diisi dengan cara atau langkah penghitungan untuk mencapai target yang akan ditetapkan
CONTOH= Untuk target yang merupakan hasil rilis dari kinerja BPS, pada kolom penjelasan/formulasi penghitungan diisi "Nilai Penghitungan oleh BPS"
- Target Kinerja ditetapkan oleh pejabat yang bersangkutan dengan memperhatikan potensi yang dimiliki (anggaran, SDM, standar teknis, dan lain-lain)